

BAB II

KOMITMEN DAN STRATEGI KONTRATERORISME AMERIKA SERIKAT

Kebijakan kontraterorisme AS adalah salah satu kebijakan luar negeri AS yang paling menonjol. Pasca terjadinya peristiwa 9/11, deklarasi perang AS terhadap terorisme telah membentuk sebuah tatanan politik internasional yang baru. Tujuan dari bab ini adalah memberikan pemahaman mengenai keseriusan AS dalam kontraterorisme dan mendeskripsikan usaha-usaha AS secara mendetail dalam hal tersebut. Dalam tiga subbab yang terdapat dalam bab ini, penulis menjabarkan usaha-usaha kontraterorisme AS yang mencakup operasi-operasi militer di berbagai wilayah yang rawan dan/atau sedang mengalami pemberontakan dari kelompok teroris, pemberian pelatihan militer dan bantuan kemanusiaan serta pemberian dukungan secara politik untuk pendirian pemerintahan yang demokratis. Bab ini juga menjelaskan strategi kontraterorisme AS secara detail dan ditutup dengan kesimpulan.

2.1 Komitmen AS Memerangi Terorisme

Pasca terjadinya 9/11, AS merupakan negara yang berada dalam garda terdepan yang mengelu-elukan perlunya usaha untuk memerangi terorisme. Serangan terhadap gedung *World Trade Center* di New York dan Pentagon di Washington D.C. meninggalkan kesan yang begitu dalam terhadap AS, terutama keamanan nasionalnya. Serangan langsung dari pihak asing di dalam teritori AS yang merupakan negara adidaya merupakan sebuah ancaman yang sangat besar, sehingga memicu *global*

outcry yang mengecam tindakan terorisme tersebut. Sehari setelah 9/11, Presiden US pada saat itu, George W. Bush, menyatakan bahwa 9/11 merupakan *act of war* terhadap AS dan sekutunya. Dalam pidato kepresidenan Bush pada tanggal 21 September 2001, Bush menyatakan ‘perang’ terhadap aksi terorisme ini, dikutip sebagai berikut:

...They were acts of war. This will require our country to unite in steadfast determination and resolve. ... The United States of America will use all our resources to conquer this enemy. We will rally the world. We will be patient. We'll be focused, and we will be steadfast in our determination. This battle will take time and resolve, but make no mistake about it, we will win. (BBC 2001)

Pasca pidato kepresidenan tersebut, Bush juga mengajak aliansi AS dan negara-negara lain untuk memerangi terorisme, seperti yang disampaikan oleh pidato kepresidenan Bush berikut:

... This is not, however, just America's fight. And what is at stake is not just America's freedom. This is the world's fight. This is civilization's fight. This is the fight of all who believe in progress and pluralism, tolerance and freedom. We ask every nation to join us. We will ask, and we will need, the help of police forces, intelligence services, and banking systems around the world. (BBC 2001)

Langkah selanjutnya yang diambil pemerintahan Bush dalam mendorong aksi kontraterorisme adalah penerjunan pasukan militer AS pada Oktober 2001 di Afganistan, yang sebelumnya disetujui oleh kongres dan senat dengan disahkannya *Authorization for the Use of Military Force (AUMF)* pada 18 September 2001. AUMF memperbolehkan presiden memiliki wewenang penuh untuk menggunakan kekuatan militer AS seperlu dan secukupnya untuk melawan organisasi maupun negara yang membantu serangan 9/11 (US Congress 2001). Selain itu, pemerintahan AS juga

menerbitkan *National Strategy for Combatting Terrorism* (NSCT) pada 2003, dimana di dalamnya tercantum pentingnya AS menjadi garda terdepan dalam melawan terorisme, termasuk strategi kontraterorisme AS. Dalam NSCT, disebutkan juga bahwa AS akan senantiasa terus mengajak negara-negara di dunia untuk ikut melawan terorisme, seperti yang dikutip sebagai berikut:

... states are weak but willing, we will support them vigorously in their efforts to build the institutions and capabilities needed to exercise authority over all their territory and fight terrorism where it exists. ... states are reluctant, we will work with our partners to convince them to change course and meet their international obligations. ... states are unwilling, we will act decisively to counter the threat they pose and, ultimately, to compel them to cease supporting terrorism. (U.S. Department of State 2003, 12)

Usaha AS untuk melawan terorisme tidak berhenti dengan menerbitkan NSCT dan diplomasi dengan negara-negara lain untuk ikut melawan terorisme bersama AS saja. *Operation Enduring Freedom - Afghanistan* (OEF-A) merupakan operasi militer AS dan sekutu yang menandai mulainya *Global War on Terrorism* (GWOT). OEF-A ini bertujuan untuk menumpas Taliban dan Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden, yang juga dikaitkan dengan serangan 9/11 (CNN 2016). Operasi-operasi militer lain terus dilakukan oleh AS, seperti rangkaian OEF lain yaitu OEF-Trans Sahara, OEF-Philippines dan OEF-Horns of Africa serta operasi militer AS dan sekutu yang paling baru, *Operation Inherent Resolve* di Irak-Suriah demi menumpas ISIL.

2.1.1 Operation Enduring Freedom – Afghanistan

Sebelum diterjungkannya OEF-A, Bush mengecam Taliban melalui pidato kepresidenannya yang berbunyi:

The United States respects the people of Afghanistan -- after all, we are currently its largest source of humanitarian aid -- but we condemn the Taliban regime. It is not only repressing its own people, it is threatening people everywhere by sponsoring and sheltering and supplying terrorists. By aiding and abetting murder, the Taliban regime is committing murder. (The White House 2001)

Selain itu, Bush juga mengultimatum Taliban untuk menyerahkan Osama bin Laden kepada AS, yang kemudian ditolak oleh Taliban karena tidak mencukupi bukti bahwa bin Laden terlibat dalam peristiwa 9/11. *Operation Enduring Freedom – Afghanistan* sendiri merupakan operasi militer AS dan sekutu yang mulai diterjunkan pada 7 Oktober 2001. Tujuan dari OEF-A ini adalah menghentikan perlindungan Taliban terhadap Al-Qaeda, yang dianggap sebagai pelaku peristiwa 9/11, serta menghentikan operasi Al-Qaeda di Afganistan (CNN 2016).

Operasi yang dimulai sejak 7 Oktober 2001 tersebut dibantu oleh *Afghan Northern Alliance*, juga pasukan kusus dari Inggris, Australia, Norwegia, Kanada, Selandia Baru dan Jerman. Kabul adalah kota pertama yang berhasil di ambil kembali oleh *Northern Alliance*¹, disusul oleh Herat dan Jalalabad. OEF-A berhasil menumpas Taliban pada 7 Desember 2001, tepat dua bulan setelah penerjunan OEF-A, dengan

¹ *Northern Alliance* merupakan kelompok oposisi multi-etnis, yang terdiri dari Suku Tajik, orang-orang Usbekistan dan Suku Hazaras (BBC History 2001).

jatuhnya daerah kekuasaan Taliban terakhir, yaitu Kandahar di Provinsi Zabul ke tangan AS dan koalisinya.

Meskipun Taliban berhasil dikalahkan pada tahun 2001, sisa-sisa kombatan Taliban berusaha mengambil kembali daerah kekuasaan mereka sehingga OEF-A belum dapat diakhiri. Pasukan Taliban terus memerangi ISAF-NATO (*International Security Assistance Force – NATO*)² dan resurgensi terjadi pada 2002, sehingga pada Maret 2002, ISAF NATO dan tentara Afganistan yang pro-pemerintahan berkoalisi dalam Operasi Anakonda. Salah satu operasi militer terbesar pasca munculnya kembali Taliban adalah *ISAF Operation Mountain Thrust*, yang dinilai tidak berhasil. Meskipun begitu, OEF-A berhasil mengeksekusi Osama bin Laden pada 2 Mei 2011 di Pakistan (BBC t.t.).

OEF-A secara tidak resmi berakhir ketika Presiden Obama memutuskan untuk menarik kembali 10.000 tentara AS dari Afganistan pada akhir 2011 dan 23.000 lainnya pada 2012. OEF-A berakhir secara resmi pada 28 Desember 2014 dengan diturunkannya bendera ISAF (*International Security Assistance Force*) di Afganistan (North Atlantic Treaty Organization 2014).

² ISAF-NATO merupakan pasukan koalisi militer bentukan NATO yang diresmikan melalui Konferensi Bonne pada Desember 2001 untuk membantu AS dalam usaha kontraterorisme di Afganistan (North Atlantic Treaty Organization 2015).

2.1.2 *Trans-Sahara Counterterrorism Partnership (TSCP)*

Trans-Sahara Counterterrorism Partnership (TSCP) adalah program pemerintah AS yang didirikan pada tahun 2005 dengan tujuan utama memberikan pelatihan kontraterorisme dan kesiapan untuk menghadapi pemberontakan oleh kelompok-kelompok ekstrimis di negara-negara Afrika Utara dan Afrika Barat, secara spesifik adalah Algeria, Burkina Faso, Kamerun, Chad, Mali, Mauritania, Moroko, Niger, Nigeria, Senegal, dan Tunisia. Tujuan pemerintahan AS dalam TSCP mencakup peningkatan kemampuan regional dalam menghadapi terorisme, institusionalisasi kerjasama keamanan regional, promosi mengenai pentingnya pemerintahan yang demokratis, mendiskreditkan ideologi teroris serta mempromosikan kerjasama bilateral dalam bidang militer dengan AS (Global Security, t.t.).

Komponen non-militer TSCP yang berfokus pada diplomasi publik menekankan pada pelestarian nilai-nilai tradisional dan strategi kontraterorisme yang memiliki kearifan lokal, dengan membangun citra yang baik tentang demokrasi dan kerjasama dengan AS. Komponen ini juga berfokus kepada keterlibatan pemerintahan AS dalam kebijakan-kebijakan demokratis dari pemerintahan negara-negara yang termasuk dalam TSCP untuk memberikan dukungan secara politik maupun ekonomi agar negara-negara tersebut lebih mampu menghadapi ancaman dari dalam. USAID juga berpartisipasi di TSCP dalam menyalurkan bantuan dalam bidang sipil dan sosial.

TSCP juga memiliki komponen militer yang lebih dikenal sebagai *Operation Enduring Freedom: Trans-Sahara* (OEF-TS). OEF-TS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas negara-negara cakupan TSCP dalam melawan terorisme dan keamanan nasionalnya, sehingga bantuan yang diberikan oleh AS lebih berupa pelatihan kemiliteran dibandingkan *airstrike*. Melalui OEF-TS, pemerintah AS yang bekerjasama dengan AFRICOM³ memberikan pelatihan, saran dan dukungan seperti *sharing* informasi kemiliteran, pelatihan militer yang bersifat transnasional, deradikalisasi ideologi ekstremis, mempertahankan operasi militer di cakupan regional, membangun profesionalitas dan akuntabilitas kemiliteran, memberikan dukungan dalam bidang logistik dan pengangkutan udara serta dukungan terhadap pasukan udara dan pasukan darat. AFRICOM juga mengadakan program-program seperti *Joint Planning Assistant Team* (JPAT), *Mobile Training Teams* (MITT), *Civil Military Support Elements* (CMSE), *Military Information Support Teams* (MIST), *Joint Combined Exchange Training* (JCET), serta *Counterterrorism Train and Equip* (CTTE) (Global Security, t.t.).

2.1.3 Operation Inherent Resolve

³ AFRICOM merupakan singkatan dari *US Africa Command*, merupakan satu dari enam komando militer AS di tingkat regional yang bertanggungjawab dan beroperasi di Afrika. AFRICOM juga bertanggungjawab atas segala tindakan militer yang terjadi di Afrika. Mulai beroperasi sejak 1 Oktober 2007 dan menjadi komando independen di tahun berikutnya (AFRICOM, t.thn.).

Sebelum diresmikannya OIR, AS melancarkan serangan udara terhadap Irak dan Suriah sejak meluasnya okupasi ISIL di Irak dan Suriah, terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2014. Di Suriah, koalisi militer AS bersama Suku Kurdi berhasil merebut kembali Kobani. Sementara di Irak, koalisi militer AS juga berhasil merebut kembali Ramadi, Sinjar, Baiji, Raqqa dan Tirkrit (Glenn 2016). Untuk ‘meresmikan’ operasi militernya di Irak dan Suriah, koalisi militer AS memberi operasi militernya nama, yaitu *Operation Inherent Resolve* (OIR), atau lengkapnya adalah *Combined Joint Task Force-Operation Inherent Resolve* (CJTF-OIR) pada 17 Oktober 2014 (*Operation Inherent Resolve*, t.thn.). Nama *Inherent Resolve* merefleksikan komitmen AS dan koalisi yang besar terhadap usaha anti-terorisme global, serta menunjukkan dedikasi dan keinginan AS dan koalisi untuk menumpas ISIL menggunakan semua dimensi kekuatan nasional AS yaitu *diplomatic, information, military* dan *economic* untuk mengalahkan ISIL.

Strategi AS dalam menumpas ISIL secara umum masih mengikuti *National Strategy to Combat Terrorism* yang dirilis pada 2003, tetapi OIR memiliki sembilan poin strategi yang lebih spesifik untuk hasil yang lebih maksimal. Strategi-strategi tersebut, selain sejalan dengan NSCT, juga berfokus pada pentingnya dukungan moral terhadap demokratisasi di Irak, memberikan pelatihan kemiliteran, dukungan yang bersifat kemanusiaan serta mencegah masuknya *foreign fighters*. Untuk memaksimalkan usaha kontraterorisme ISIL, pada tahun 2015 AS berfokus terhadap perebutan kembali Raqqa dan Ramadi yang membuahkan hasil berupa

pembebasan Sinjar⁴, pembebasan Ramadi yang jatuh ke tangan ISIL pada Mei 2015, progres dalam penguncian daerah penghubung yang vital bagi ISIL sebelum pengambilan kembali Raqqa, serta serangan terhadap sumber minyak yang dikendalikan ISIL melalui *Operation Tidal Wave II* (Department of Defense 2015, 36)

Dalam laporan tahunan AS mengenai OIR, disebutkan bahwa AS telah melaksanakan 78% dari 9.300 serangan udara yang dilaksanakan di Suriah per 3 Januari 2016 (Department of Defense 2015, 1) dan telah menghabiskan dana sebanyak lebih dari US\$ 11 miliar per 31 Desember 2015 (Department of Defense 2015, 18). Jumlah dana tersebut bertambah dengan dianggarkannya US\$715 juta untuk *Iraq Train and Equip Fund* (ITEF)⁵, US\$ 80 juta untuk keperluan asistensi keamanan pemerintahan AS di Irak dan US\$ 531 juta untuk pembentukan *Syria Train and Equip Fund* (STEF)⁶. Selain itu, OIR juga meminta tambahan dana sebanyak US\$ 1.82 miliar untuk operasi tambahan di Suriah dan negara sekitar,

⁴ Kota di Irak yang terhubung dengan pusat kendali ISIL di Mosul (Irak) dan Raqqa (Suriah).

⁵ *Iraq Train and Equip Fund* adalah program OIR yang berfokus terhadap empat elemen penting dalam usaha pembentukan kapasitas di Irak, yakni *assist*, *train*, *equip* dan *reform* (Department of Defense 2015, 49).

⁶ *Syrian Train and Equip Fund* merupakan program OIR yang berfokus kepada pelatihan kapabilitas militer, modernisasi kemiliteran serta stabilisasi daerah konflik yang berfokus di Suriah. Program pelatihan ini dimulai pada 9 Mei 2015 (Department of Defense 2015, 43).

sehingga secara umum penganggaran dana untuk operasi militer di Irak dan Suriah serta sekitarnya pada 2016 meningkat sebanyak 17% dibanding dana yang dialokasikan pada 2014 (Department of Defense 2015, 18).

OIR masih berlanjut hingga saat ini, dengan data terbaru yang telah di sunting oleh Departemen Pertahanan AS pada 26 Juli 2017 menunjukkan sebanyak total 23.922 serangan udara di Irak dan Suriah telah dilaksanakan dalam usaha menumpas ISIL.

2.2 Strategi Kontraterorisme AS

Secara umum, strategi kontraterorisme AS dapat dijabarkan menjadi empat langkah, yaitu *defeat*, *deny*, *diminish* dan *defend* dimana masing-masing dari langkah tersebut memiliki obyek dan sasaran yang berbeda-beda. Seperti namanya, *defeat* berarti melumpuhkan gerak kelompok teroris dengan menggunakan kekuatan militer dan menyerang markas serta pusat komado. Dalam melumpuhkan kelompok teroris, AS menjelaskan tiga langkah yang perlu ditempuh. Langkah pertama adalah memahami kelompok teroris tersebut. AS percaya bahwa memahami dan menganalisis musuh adalah hal yang penting. Informasi mengenai organisasi teroris tentu dapat memberikan kemudahan dalam menyusun strategi apa saja yang cocok untuk mengalahkan suatu organisasi teroris. Langkah kedua yang dianggap penting oleh AS untuk melumpuhkan gerak kelompok teroris adalah dengan mengetahui lokasi

kelompok tersebut, sehingga AS dapat memperkirakan kapasitas militer apa saja yang harus digunakan untuk meringkus organisasi teroris tersebut.

Setelah mengidentifikasi dan memahami lokasi dari suatu organisasi teroris, langkah yang ketiga dalam usaha AS untuk melumpuhkan gerak-gerik kelompok teroris, AS dan koalisi akan menggunakan jalur ofensif untuk melumpuhkan organisasi teroris. AS dan koalisi akan menggunakan berbagai cara yang dapat dilakukan untuk melumpuhkan dan mengakhiri suatu organisasi teroris. Dalam hal ini, AS menjabarkan tiga langkah utama dalam melumpuhkan terorisme. Pertama, badan hukumnya akan menangkap dan mengadili para tersangka teroris. Kedua, koalisi militer AS akan terus melakukan serangan ofensif untuk meringkus organisasi terorisme global dan ketiga, dengan kerjasama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional, AS akan meringkus pendanaan terorisme. Dalam mensinkronisasikan usaha-usaha tersebut, Departemen Pertahanan AS akan mengembangkan strategi yang terpusat pada usaha kontraterorisme regional.

Deny berarti menggagalkan masuknya dukungan finansial maupun materiil terhadap kelompok teroris dengan cara memastikan negara dimana kelompok teroris tersebut bersarang mematuhi konvensi anti-terorisme yang berlaku. AS akan terus berusaha mengajak negara-negara yang enggan atau keberatan dengan konvensi anti-terorisme agar lambat laun menyetujui langkah-langkah anti-terorisme yang disetujui bersama; AS juga akan memberikan bantuan kepada negara-negara yang kurang *'power'* namun berkomitmen dengan konvensi anti-terorisme.

Strategi AS untuk menggagalkan dukungan kepada kelompok teroris ini memiliki tiga poin aksi. Pertama-tama, strategi *deny* ini memfokuskan pada penekanan tanggungjawab tiap negara untuk menangkal terorisme, baik di dalam wilayah kedaulatan masing-masing maupun secara internasional. Selanjutnya, melalui poin pertama tersebut, AS akan mengetahui negara-negara mana saja yang serius dalam melawan terorisme namun tidak atau belum mampu untuk bertindak demikian, sehingga AS akan mengawal negara-negara tersebut dalam usaha melawan terorisme mereka. Setelah AS berhasil mengelompokkan negara-negara menjadi tiga kategori (sepakat dan mampu, sepakat namun tidak mampu, tidak sepakat dan tidak mampu) AS akan menekan negara-negara yang tidak ingin bekerjasama dalam usaha kontraterorisme AS dan jika perlu, AS dan koalisi akan bertindak secara independen dan mengambil langkah yang tepat untuk mempersuasi negara-negara tersebut supaya dapat mengganti kebijakan mereka yang semula tidak kooperatif menjadi kooperatif. AS juga menggarisbawahi pentingnya NGO (*non-governmental organization*) dalam melawan terorisme internasional.

Selain menekankan pentingnya mengakhiri penyokongan terorisme, AS juga akan menerapkan aturan yang ketat dalam memerangi terorisme. Bekerjasama dengan Dewan Keamanan PBB, pendirian Resolusi DK PBB 1373 (2001) akan memberikan standar internasional dalam usaha memerangi terorisme. Resolusi ini menuntut negara anggota untuk bekerjasama dalam segala spektrum untuk memerangi terorisme. Dengan persuasi, adanya peningkatan jumlah negara-negara yang

mengimplementasikan Resolusi DK PBB 1373 (2001) diharapkan dapat membuahkan progres yang nyata dalam usaha memerangi terorisme. AS juga akan mendorong organisasi internasional, regional dan sub-regional untuk meminta kepada negara-negara anggotanya supaya mengimplementasikan Resolusi DK PBB 1373 (2001).

Selanjutnya dalam Strategi 4D anti-terorisme AS, *diminish* berarti mengurangi situasi dimana kelompok teroris dapat ‘berkembang biak’, dengan memusatkan perhatian kepada daerah-daerah yang rawan terorisme. Daerah-daerah yang ‘rawan’ yang dapat menghasilkan kelompok teroris adalah daerah-daerah yang tidak stabil secara sosial, ekonomi maupun politik sehingga member celah untuk ideologi ekstrimis untuk berkembang. Meskipun begitu, keadaan domestik yang kurang stabil bukan merupakan alasan yang dapat menjustifikasi munculnya kelompok teroris.

Untuk merealisasikan strategi *diminish* ini, AS akan terus melanjutkan dukungannya terhadap negara-negara yang bermasalah dalam menyelesaikan konflik regionalnya, mendirikan pemerintahan yang demokratis dan stabil, mendorong perkembangan dalam aspek sosial, ekonomi dan politik serta mempromosikan ekonomi yang berdasarkan pasar bebas. Hal tersebut dilakukan agar tidak muncul celah bagi kelompok teroris untuk menyebarkan ideologi ekstrimisnya. AS juga akan bekerjasama dengan sekutunya untuk mencegah terjadinya kemunculan (ataupun kemunculan kembali) ideologi ekstrimis. Dijelaskan bahwa salah satu kebijakan luar negeri AS adalah membantu negara-negara yang tidak stabil (dalam konteks kontraterorisme dan pencegahan terorisme) seperti yang dikutip sebagai berikut:

... we will ensure that efforts designed to identify and diminish conditions contributing to state weakness and failure are a central U.S. foreign policy goal. The principal objective of our collective response will be the rebuilding of a state that can look after its own people—their welfare, health, prosperity, and freedom—and control its borders. (U.S. Department of State 2003, 23)

Selain membantu negara-negara yang tidak stabil, AS juga akan menggunakan diplomasi sebagai alat untuk menyebarkan ide bahwa terorisme merupakan hal yang tidak dapat dijustifikasi apapun alasannya, seperti yang dikutip sebagai berikut:

... we will wage a war of ideas to make clear that all acts of terrorism are illegitimate, to ensure that the conditions and ideologies that promote terrorism do not find fertile ground in any nation, to diminish the underlying conditions that terrorists seek to exploit in areas most at risk, and to kindle the hopes and aspirations of freedom of those in societies ruled by the sponsors of global terrorism. (U.S. Department of State 2003, 23)

Dengan mendirikan anggapan universal bahwa terorisme adalah hal yang buruk dan harus dilawan bersama-sama dengan melibatkan negara-negara lain, *outcome* yang diharapkan AS adalah terciptanya sebuah norma internasional yang tidak mengakui keberadaan kelompok teroris maupun ideologinya.

Strategi terakhir dalam 4D adalah *defend*, yang berarti melindungi warga negara dan kepentingan AS. AS menjanjikan perlindungan kepada warga negaranya baik yang berada di dalam batas wilayah kedaulatan AS maupun di luar dengan memaksimalkan *National Strategy for Homeland Security* dan *National Strategy for Combating Terrorism*, salah satunya adalah dengan melakukan *sharing* informasi dengan sekutu-sekutu AS.

2.3 Kesimpulan

Usaha kontraterorisme AS tidak berhenti dengan mendeklarasikan perang terhadap kelompok teroris dan ideologinya saja. Berbagai usaha telah dilakukan oleh AS, termasuk operasi-operasi militer dan pemberian pelatihan-pelatihan militer serta bantuan humaniter di berbagai wilayah yang rawan atau tengah mengalami serangan teroris. AS juga mengembangkan strategi jangka panjang maupun jangka pendek yang dapat diterapkan untuk membasmi terorisme.

Meskipun demikian, dapat dilihat secara garis besar bahwa AS cenderung lebih mencurahkan usaha yang lebih dalam memerangi ISIL melalui OIR dibanding dalam memerangi Boko Haram melalui TSCP dan OEF-Trans Sahara. Hal tersebut kontradiktif dengan pernyataan AS sendiri yang menekankan berulang-ulang mengenai kesanggupannya untuk membantu negara-negara yang berniat untuk membasmi terorisme namun tidak dapat bertindak demikian karena kurangnya sumberdaya. Pada bab selanjutnya, penulis menjelaskan mengapa hal demikian dapat terjadi dengan mempertimbangkan hipotesis pertama, yakni kurangnya kepentingan nasional AS di Nigeria sehingga ketimpangan usaha memerangi kedua kelompok teroris tersebut dapat terjadi.